Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Halaman: 476 – 490

RESEARCH ARTICLE

Implementasi Kebijakan Manajemen Sarana dan Prasarana Program Studi Ilmu Administrasi Negera Universitas Negeri Surabaya

Rut Elisabeth Br. Nainggolan[1], Ridhatul Nuramadhani Asyifa [2], Natasya Rizky Amalia[3], Avril Widya Ariesta[4], Sintha Dwi Aprillya[5]
Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

rut.23350@mhs.unesa.ac.id[1], ridhatul.23351@mhs.unesa.ac.id[2], natasya.23353@mhs.unesa.ac.id[3], avril.23368@mhs.unesa.ac.id[4], sintha.23378@mhs.unesa.ac.id[5]

Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan, Manajemen, Sarana dan Prasarana, Perguruan Tinggi, Administrasi Publik.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kelancaran kegiatan akademik di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang meliputi empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Administrasi Publik UNESA dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana serta mahasiswa sebagai pengguna fasilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak program studi maupun fakultas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas pendidikan guna mendukung kualitas pelayanan dan proses pembelajaran.

Keyword:
Policy Implementation, Management, Facilities and Infrastructure, Higher Education, Public Administration.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of policies regarding the management of facilities and infrastructure in support of the learning process within the Bachelor's (S1) Public Administration program at the Faculty of Social Sciences and Law, State University of Surabaya (UNESA). The management of facilities and infrastructure is a crucial aspect in ensuring the smooth execution of academic activities in higher education institutions. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design. The analysis of policy implementation is based on George C. Edward III's theory, which encompasses four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research was conducted within the Public Administration program at UNESA, involving stakeholders responsible for the management of facilities and infrastructure, as well as students who utilize these facilities. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and document analysis. The data were subsequently analyzed using the model developed by Miles, Huberman, and Saldaña, which involves data condensation, data display, and the drawing and verification of conclusions. This study is expected to provide an in-depth overview of the policy implementation process for facilities and infrastructure management, while identifying the factors that facilitate or hinder its execution. The findings are intended to serve as a basis for evaluation and to provide recommendations for the study program and the faculty to enhance the effectiveness of educational facility management, thereby supporting the quality of services and the learning process.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang tidak hanya di tuntut menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menyediakan lingkungan pembelajaran yang mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan(Sassi et al., 2024). Salah satu komponen yang berperan dalam mendukung proses tersebut adalah sarana dan prasarana. Ketersediaan ruang pembelajaran, fasilitas teknologi, laboratorium, ruang diskusi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian dari lingkungan akademik yang memungkinkan kegiatan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pembelajaran berlangsung secara efektif. Menurut(Soro et al., 2023). menjelaskan bahwa sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di perguruan tinggi, sehingga pengelolaan tersebut mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, hingga penghapusan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, persoalan sarana dan prasarana tidak berhenti pada tersedianya fasilitas secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana fasilitas tersebut dikelola agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penggunaan. Pengelolahan yang baik membutuhkan prosedur yang jelas, pembagian tanggung jawab, mekanisme pemeliharaan, serta respons terhadap permasalahan yang muncul selama fasilitas digunakan. Menurut penelitian (Lisa et al., 2025) menunjukkan bahwa kualitas pengelolahan fasilitas perguruan tinggi dipengaruhi oleh strategi manajerial dan kapasitas sumber daya manusia, bukan hanya oleh kondisi fisik bangunan. Penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan pola pengelolahan yang lebih reaktif. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolahan sarana dan prasarana merupakan proses kelembagaan yang membutuhkan kebijakan dan mekanisme kerja yang konsisten.

Kebutuhan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana tersebut menjadi semakin penting karena pengalaman mahasiswa dalam menggunakan fasilitas dapat mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran. Melalui penelitian kualitatif mengenai pengalaman mahasiswa dalam mengakses fasilitas kampus, menemukan bahwa fasilitas yang secara umum tersedia masih dapat menghadirkan berbagai persoalan teknis, seperti gangguan AC, proyektor, dan koneksi internet(Tri Satria et al., n.d.). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga dengan pemeliharan preventif, kecepatan respons terhadap pengaduan, dan perilaku pengguna dalam memanfaatkan fasilitas. Dengan demikian, pengelolahan sarana dan prasarana perlu di pahami sebagai proses yang berlangsung sejak fasilitas disediakan hingga digunakan dan dipelihara secara berkelanjutan.

Konteks umum tersebut kemudian dapat dilihat pada lingkungan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan tinggi, FISIPOL UNESA telah memiliki perangkat prosedural dalam pengelolahan sarana dan prasarana. Dokumen resmi fakultas menunjukkan adanya SOP mengenai pengadaan barang dan jasa, penerimaan dan penyimpanan barang atau jasa, pemeliharaan dan perbaikan sarana, penggunaan sarana TIK, serta penggunaan sejumlah laboratorium, termasuk Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Publik. Selain itu, FISIPOL juga menyediakan SOP layanan dan pengaduan sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan(Indah Prabawati et al., n.d.). Keberadaan berbagai prosedur tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana telah memiliki dasar formal yang mengatur proses penyediaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pelayanan fasilitas.

Pada tingkat yang lebih spesifik, konteks tersebut berkaitan langsung dengan Program Studi Administrasi Publik UNESA yang dalam kegiatan akademiknya membutuhkan berbagai sarana pendukung pembelajaran. Salah satu fasilitas yang memiliki keterkaitan dengan bidang keilmuan Administrasi Publik adalah Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Publik. Dokumen SOP penggunaan laboratorium mengatur penggunaan ruang baca dan ruang diskusi, peminjaman serta pengembalian buku, waktu pelayanan, pihak yang bertanggung jawab, jangka waktu peminjaman, dan ketentuan sanksi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran tidak hanya diposisikan sebagai ruang atau benda yang disediakan oleh institusi, tetapi juga sebagai fasilitas yang penggunaannya perlu diatur melalui prosedur tertentu(Jannah & Santosa, 2025). Dalam konteks ini, keberadaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana menjadi penting untuk memastikan fasilitas dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan akademik mahasiswa dan pelaksana pembelajaran(Indah Prabawati et al., n.d.)

Gejala permasalahan dalam pengelolaan sarana dan prasarana kemudian dapat dilihat dari adanya kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Menurut penelitian(Prima Putri Regina et al., n.d.) pada FISIPOL UNESA menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana secara keseluruhan dinilai baik oleh mahasiswa dan memiliki hubungan positif dengan kepuasan mahasiswa. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa beberapa aspek masih memerlukan perhatian, terutama area parkir, ruang diskusi mahasiswa, dan pemeliharaan fasilitas.

Untuk memahami proses tersebut, teori implementasi kebijakan George C. Edward III relevan digunakan sebagai landasan analisis. Edward III menjelaskan implementasi kebijakan melalui empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi(Sry Ramdani & Surya Abdi, 2025). Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan dan dipahami oleh pelaksana; sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung; disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur, dan mekanisme organisasi (Sitorus, n.d.). Penggunaan kerangka tersebut dalam

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

penelitian kualitatif masih relevan untuk mengidentifikasi mengapa suatu kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan atau justru menghadapi hambatan. Menurut penelitian, misalnya, menggunakan empat dimensi Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan secara kualitatif dan menunjukkan bahwa persoalan komunikasi, sumber daya, disposisi, serta koordinasi dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut masih menyisakan ruang penelitian yang dapat dikembangkan. Menurut penelitian (Prima Putri Regina et al., n.d.-b) berfokus pada hubungan kualitas sarana dan prasarana dengan kepuasan mahasiswa menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum menjelaskan secara mendalam proses kebijakan yang berlangsung di balik pengelolaan fasilitas. Penelitian Satria et al. (2025) memberikan gambaran mengenai pengalaman mahasiswa dalam mengakses fasilitas, tetapi objek penelitiannya berada di Gedung PPG UIN Jakarta. Sementara itu, menurut penelitian (Soro et al. 2023) membahas pengelolaan sarana dan prasarana dalam konteks pemenuhan standar mutu di IPI Garut. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara khusus implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pada Program Studi Administrasi Publik UNESA, terutama dengan melihat komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai proses yang saling berkaitan.

Penelitian ini penting dilakukan karena pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya menentukan tersedianya fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan kualitas layanan pembelajaran. Di satu sisi, FISIPOL UNESA telah memiliki SOP dan mekanisme layanan yang menunjukkan adanya kerangka kelembagaan dalam pengelolaan fasilitas. Di sisi lain, penelitian empiris di lingkungan FISIPOL UNESA masih menunjukkan adanya aspek fasilitas yang memerlukan perhatian, terutama pemeliharaan dan beberapa fasilitas pendukung mahasiswa. Kondisi tersebut menjadikan penelitian mengenai implementasi kebijakan penting untuk menghasilkan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan dilaksanakan, bagaimana pelaksana menjalankan tanggung jawabnya, bagaimana pengguna memperoleh manfaat dari fasilitas, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan formal dan praktik pengelolaan sarana prasarana pada tingkat program studi, sebagaimana pentingnya konsistensi tata kelola fasilitas yang juga ditunjukkan oleh penelitian dari (Ramdani et al. 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran pada Program Studi Administrasi Publik UNESA. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana komunikasi kebijakan berlangsung, bagaimana sumber daya mendukung pelaksanaan kebijakan, bagaimana disposisi atau sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan, serta bagaimana struktur birokrasi mengatur proses pengelolaan sarana dan prasarana. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian diharapkan dapat menggambarkan proses implementasi secara lebih mendalam berdasarkan perspektif pelaksana dan pengguna serta memberikan pemahaman mengenai kesesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran. Kerangka tujuan tersebut sejalan dengan penelitian implementasi kebijakan kualitatif yang menggunakan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan secara kontekstual.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya. Penelitian tidak berfokus pada pengukuran angka, tetapi pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan sarana dan prasarana.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sarana dan prasarana, seperti ketua program studi, tenaga kependidikan, pengelola sarana dan prasarana, serta mahasiswa sebagai pengguna fasilitas. Data dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pertimbangan bahwa Program Studi Administrasi Publik UNESA memiliki fasilitas pendukung pembelajaran, salah satunya Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Publik, yang pengelolaannya telah diatur melalui SOP tertentu, namun proses implementasi kebijakan tersebut di tingkat program studi masih perlu dikaji secara lebih mendalam.

Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2026, yang meliputi tahap penyusunan proposal, observasi di awal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran pada Program Studi Administrasi Publik UNESA, dengan menggunakan empat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edward III sebagai berikut: a). Komunikasi, yaitu bagaimana kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana disampaikan dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, meliputi aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi kebijakan. b). Sumber Daya, yaitu ketersediaan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana. c). Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana. d). Struktur Birokrasi, yaitu mekanisme kerja, pembagian tugas, serta Standard Operating Procedures (SOP) yang mengatur pelaksanaan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana.

Selain keempat variabel tersebut, penelitian ini juga difokuskan pada identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pada Program Studi Administrasi Publik UNESA.

Subjek dan Informan Penelitian

a). Subjek Penelitian : Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang menjadi lokus kajian mengenai implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Program Studi Ilmu Administrasi Publik UNESA memiliki kebijakan serta unit pengelolaan sarana dan prasarana yang secara langsung menunjang proses pembelajaran, kegiatan akademik, maupun pelayanan bagi mahasiswa dan dosen, sehingga relevan untuk dikaji sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

b). Informan Penelitian : Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, di mana informan yang dipilih dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti sehingga mampu memberikan data secara mendalam dan akurat terkait implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana di Program Studi Ilmu Administrasi Publik UNESA.

Adapun kriteria informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: Pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengadaan, maupun pengelolahan sarana dan prasarana di lingkungan program studi/fakultas, pihak yang memahami kebijakan serta mekanisme pengelolahan sarana dan prasarana di Program Studi Ilmu Administrasi Publik UNESA, pihak yang menggunakan atau merasakan langsung dampak dari ketersediaan sarana dan prasarana, dalam hal ini mahasiswa dan dosen, bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi secara terbuka sesuai dengan kebutuhan penelitian

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini terdiri atas Ketua atau Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik, yang berperan sebagai pengambil kebijakan sekaligus penanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat program studi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan staf atau tenaga kependidikan bagian sarana dan prasarana di tingkat fakultas maupun universitas, sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana prasarana. Informan berikutnya adalah dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Publik, yang berperan sebagai pengguna sarana dan prasarana dalam kegiatan perkuliahan serta kegiatan penunjang akademik lainnya. Terakhir, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik turut dijadikan informan sebagai pihak yang merasakan langsung penggunaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran maupun aktivitas kampus sehari-hari.

Jumlah informan tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan bersifat fleksibel dan dapat berkembang mengikuti prinsip snowball sampling, yaitu penambahan informan baru berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya apabila data yang diperoleh dirasa belum mencukupi (belum mencapai titik jenuh/data saturation). Proses pengumpulan data melalui informan akan dihentikan apabila informasi yang diperoleh sudah menunjukkan pengulangan pola (jenuh) dan tidak ditemukan lagi data baru yang relevan dengan fokus penelitian.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Sumber Data dan Penelitian

Sumber data dalam kajian ini merujuk pada entitas yang menjadi asal informasi yang dikumpulkan. Berdasarkan metodologi pengumpulannya, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder.

a). Data Primer : Data primer mencakup informasi yang diambil langsung dari sumber utamanya melalui wawancara mendalam dan observasi di lokasi tentang pelaksanaan kebijakan manajemen sarana dan prasarana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya. Data ini dihimpun dari narasumber yang ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber yang dianggap paling memahami dan terlibat dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan sarana dan prasarana di area program studi.

b). Data Sekunder : Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan secara tidak langsung, yaitu melalui analisis dokumentasi berbagai dokumen resmi serta literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat, melengkapi, dan melakukan triangulasi terhadap data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara.

Beberapa sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah: yang pertama terkait Dokumen kebijakan internal, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan fasilitas dan infrastruktur, Rencana Strategis (Renstra) untuk Program Studi/Fakultas/Universitas, serta panduan pengelolaan aset. Yang Kedua Dokumen administratif, seperti daftar inventarisasi fasilitas dan infrastruktur, laporan pengadaan, laporan pemeliharaan, dan laporan penghapusan aset.

Peraturan dan undang-undang yang terkait, contohnya Peraturan Menteri mengenai standar fasilitas pendidikan tinggi, Peraturan Rektor, atau Keputusan Dekan berkaitan dengan pengelolaan aset. Yang ketiga Studi literatur, mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel yang relevan dengan teori implementasi kebijakan publik serta manajemen fasilitas dan infrastruktur. Dan yang terakhir Dokumentasi lapangan, yang terdiri dari foto dan/atau catatan mengenai pengamatan kondisi fisik fasilitas dan infrastruktur di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Kombinasi data primer dan sekunder ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan triangulasi sumber data, dengan tujuan meningkatkan kevalidan dan keabsahan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan manajemen fasilitas dan infrastruktur di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini dipilih karena mampu saling melengkapi dalam menggali data yang kaya dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik UNESA. Sebagaimana dikemukakan dalam kajian metodologi penelitian kualitatif, observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data utama yang lazim dilakukan dalam situasi alamiah, yang hasilnya kemudian menjadi landasan objektif untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dijalankan dalam praktik.

a). Wawancara : Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan kunci, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan sarana dan prasarana di Program Studi Administrasi Publik UNESA, guna menggali perspektif, pengalaman, serta persepsi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi semata. Instrumen yang digunakan berupa pedoman wawancara (interview guide) yang disusun berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga pertanyaan yang diajukan terarah pada fokus penelitian.

b). Observasi : Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk mekanisme penggunaan, pemeliharaan, serta interaksi antara pengelola dan pengguna fasilitas di lapangan. Observasi berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat dan mengonfirmasi temuan dari hasil wawancara, karena mampu menangkap dinamika perilaku dan kondisi nyata yang berlangsung di lokasi penelitian.

c). Studi Dokumentasi : Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen terkait, seperti SOP pengadaan barang dan jasa, SOP pemeliharaan dan perbaikan sarana, SOP penggunaan laboratorium, serta dokumen layanan dan pengaduan fasilitas di lingkungan FISIPOL UNESA. Dokumen tersebut digunakan untuk mengecek dan melengkapi data yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi, sekaligus memberikan bukti formal mengenai kebijakan yang berlaku. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terintegrasi agar data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan diverifikasi melalui

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

triangulasi sumber maupun triangulasi teknik, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Keabsahan Data. Pemilihan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi ini juga sejalan dengan prinsip bahwa setiap teknik pengumpulan data hendaknya benar-benar relevan dengan rumusan masalah penelitian, bukan sekadar digunakan karena lazim dipakai dalam penelitian kualitas

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami proses implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana secara mendalam berdasarkan informasi dari informan. Analisis juga dibantu dengan pendekatan tematik untuk menemukan pola dan tema dari data penelitian (Castleberry & Nolen, 2018).

a). Kondensasi Data : Kondensasi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian diberi kode berdasarkan empat aspek teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti juga tetap memperhatikan tema baru yang muncul dari hasil penelitian.

b). Penyajian Data : Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian, tabel, atau matriks agar pola dan hubungan antar-data lebih mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat ditemukan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

c). Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan : Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan tema yang ditemukan dalam data. Kesimpulan kemudian diverifikasi dengan membandingkan kembali hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan menurut (Miles et al., 2018).

Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengelola dan mahasiswa, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi informasi tertentu kepada informan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Birt et al., 2016; Moon, 2019).

Dengan demikian, analisis data dilakukan secara sistematis melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan, serta didukung oleh pemeriksaan keabsahan data. Seluruh proses diarahkan untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang memiliki peran berbeda dalam pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu Eva Hany Fanida, S.A.P., M.A.P. selaku Koordinator Program Studi S1 Administrasi Negara periode 2023–2027, Gustiawan selaku tenaga kependidikan program studi, serta Yon Mariono selaku tenaga kependidikan Bidang 2 yang menangani sarana dan prasarana fakultas. Hasil wawancara dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan juga ditinjau melalui tahapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan program studi. Program studi berperan menyampaikan kebutuhan, mengusulkan perbaikan, memanfaatkan fasilitas, serta mendorong pengguna untuk menjaga fasilitas yang tersedia. Sementara itu, kewenangan aset dan anggaran fisik sarana prasarana berada pada tingkat fakultas, khususnya Bidang 2. Ketersediaan ruang kelas dan penentuan kebutuhan akademik juga berkaitan dengan koordinasi bersama unit lain di lingkungan universitas.

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Manajemen Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara, salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan ruang kelas setelah peningkatan jumlah mahasiswa. Para informan mengaitkan kondisi tersebut dengan bertambahnya kuota penerimaan mahasiswa setelah UNESA berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Penentuan kuota mahasiswa tidak menjadi kewenangan program studi secara mandiri, sehingga kebutuhan ruang kelas perlu disesuaikan melalui koordinasi dengan pihak fakultas dan universitas. Keterangan mengenai

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

jumlah mahasiswa dalam wawancara belum sepenuhnya seragam. Koordinator program studi menyebutkan adanya peningkatan dari sekitar satu sampai dua kelas atau kurang lebih 100 mahasiswa menjadi sekitar 11 kelas atau kurang lebih 450 mahasiswa pada angkatan 2023. Informan pengelola sarana prasarana fakultas menyampaikan kenaikan dari sekitar 80–100 mahasiswa menjadi lebih dari 200 mahasiswa. Oleh karena itu, angka tersebut perlu dikonfirmasi kembali menggunakan data resmi akademik sebelum dicantumkan sebagai angka pasti.

Keterbatasan ruang berdampak pada pengaturan jadwal perkuliahan dan penggunaan ruang. Dalam wawancara disebutkan bahwa kondisi tersebut turut memunculkan istilah "War Kelas" di kalangan mahasiswa serta mendorong penggunaan pola pembelajaran daring atau hibrida pada situasi tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan sarana prasarana tidak hanya menyangkut kondisi fisik ruang, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan proses pembelajaran.

Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model George C. Edward III

a). Komunikasi: Komunikasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana berlangsung melalui koordinasi antara dosen, program studi, dan pihak fakultas. Berdasarkan keterangan informan, laporan mengenai kebutuhan atau kerusakan fasilitas dapat disampaikan kepada Koordinator Program Studi, kemudian diteruskan atau diusulkan kepada pihak fakultas. Pelaporan kerusakan juga dapat dilakukan melalui aplikasi SIDILAN dengan melampirkan foto kondisi fasilitas. Selain itu, komunikasi informal melalui WhatsApp atau grup koordinasi pimpinan digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya beberapa saluran komunikasi formal dan informal. Keberadaan aplikasi pelaporan membantu menyampaikan informasi mengenai kerusakan, sedangkan komunikasi langsung dapat digunakan ketika masalah memerlukan perhatian segera. Namun, tindak lanjut laporan tetap bergantung pada kewenangan dan proses penanganan di tingkat fakultas. Dengan demikian, komunikasi antara pengguna fasilitas dan pengelola telah berjalan, tetapi efektivitas penyelesaian masalah juga ditentukan oleh alur koordinasi dan ketersediaan sumber daya.

b). Sumber Daya: Sumber daya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan meliputi sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, informasi, dan fasilitas fisik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan aset serta anggaran fisik sarana prasarana berada di tingkat fakultas, khususnya Bidang 2. Program studi lebih berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyampaikan usulan, menggunakan fasilitas, dan membantu menjaga kondisi fasilitas. Dari sisi sumber daya manusia, tenaga kependidikan program studi menyampaikan bahwa tugas administrasi program studi ditangani oleh satu orang. Informan tersebut menilai kondisi ini masih dapat dijalankan untuk pekerjaan sehari-hari, sementara pelatihan yang pernah diikuti lebih berfokus pada pelayanan prima dan bukan secara khusus pada manajemen sarana prasarana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan administrasi rutin tetap berjalan, tetapi penguatan kapasitas teknis terkait pengelolaan sarana prasarana dapat dipertimbangkan.

Data pendukung tahun 2026 mencatat sebanyak 35 ruang kelas dengan total 2.278 kursi dan luas ruang sekitar 2.562 m². Kapasitas antarruang berbeda-beda, mulai dari ruang berkapasitas kecil hingga ruang yang dapat menampung sekitar 79–80 orang. Terdapat pula ruang dengan kapasitas sekitar 15 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah ruang yang tersedia perlu dilihat bersama kapasitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kegiatan akademik, bukan hanya berdasarkan jumlah ruang.

Tabel 1. Data Ruang Kelas dan Kursi FISIPOL Tahun 2026

Gedung	Jumlah Ruang	Jumlah Kursi	Rata-rata Kursi/Ruang
I1	7	512	73
I2	2	159	80
I3	8	561	70
I5	6	340	57
I7	7	530	76
I8	2	30	15
G8	2	116	58
I9	1	30	30
Total	35	2278	459

Sumber : Data dari hasil wawancara

Data kondisi ruang juga mencatat adanya kebutuhan perbaikan pada 26 dari 35 ruang. Sebanyak 21 ruang memerlukan pengecatan dan pembaruan instalasi listrik, lima ruang di gedung I5 memerlukan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

penggantian tirai, serta satu ruang yaitu I5.02.03 memerlukan pembaruan kursi. Seluruh ruang dicatat memiliki LCD, meja dan kursi dosen, AC sebanyak dua unit, serta papan tulis. Meskipun fasilitas dasar tercatat tersedia, kebutuhan perbaikan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas harus disertai pemeliharaan berkala.

a). Disposisi: Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan adanya keterlibatan Koordinator Program Studi dalam menindaklanjuti persoalan fasilitas, misalnya menghubungi tim teknis ketika lampu mengalami kerusakan. Koordinator program studi juga menerima penggunaan kursi bekas yang masih layak untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat duduk mahasiswa, serta mengingatkan mahasiswa agar ikut menjaga fasilitas.

Sikap tersebut menunjukkan adanya kepedulian pelaksana terhadap keberlangsungan proses pembelajaran meskipun program studi memiliki kewenangan yang terbatas dalam pengadaan dan perbaikan. Informan juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan pimpinan program studi, fakultas, dosen, dan petugas kebersihan secara umum dapat berjalan tanpa hambatan komunikasi yang berarti. Dengan demikian, komitmen pelaksana menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga penggunaan fasilitas yang tersedia.

b). Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi terlihat dari pembagian kewenangan dan alur pelaporan kebutuhan sarana prasarana. Program studi menyampaikan kebutuhan atau laporan kerusakan, sedangkan pengelolaan aset, anggaran fisik, dan tindak lanjut teknis dilakukan melalui unit fakultas yang berwenang. Informan juga menjelaskan bahwa penentuan kecukupan kelas berkaitan dengan Bidang 1 yang menangani urusan akademik, sedangkan Bidang 2 menyediakan sarana sesuai kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Pelaporan kerusakan melalui SIDILAN memiliki target respons maksimal 1 x 24 jam menurut keterangan informan pengelola sarana prasarana. Akan tetapi, target respons tersebut perlu dibedakan dari waktu penyelesaian perbaikan. Informan lain menyampaikan bahwa perbaikan aktual dapat berlangsung beberapa hari hingga kurang dari satu bulan, bergantung pada jenis kerusakan dan proses penanganannya. Artinya, respons awal dan penyelesaian teknis merupakan dua tahapan yang berbeda.

Inventarisasi dilakukan melalui pencatatan barang per ruang secara manual, kemudian data dimasukkan ke dalam sistem oleh staf fakultas. Rekapitulasi servis AC disimpan pada bagian peralatan fakultas, sedangkan kartu servis AC tidak ditempel di ruang kelas. Mekanisme ini menunjukkan adanya pencatatan dan dokumentasi, tetapi penguatan integrasi data serta kemudahan akses informasi pemeliharaan dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan keterlacakan kondisi fasilitas.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Tahapan Manajemen

a). Perencanaan: Perencanaan kebutuhan sarana prasarana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan akademik dan kondisi fasilitas yang tersedia. Program studi mengidentifikasi kebutuhan dari aktivitas pembelajaran, kemudian menyampaikannya kepada fakultas. Keterbatasan kewenangan program studi dalam menetapkan kuota mahasiswa dan anggaran sarana prasarana membuat perencanaan membutuhkan koordinasi lintas unit. Persoalan ruang kelas menunjukkan pentingnya penyelarasan antara jumlah mahasiswa, jadwal perkuliahan, kapasitas ruang, dan rencana penyediaan fasilitas.

b). Pengadaan: Pengadaan atau pemenuhan sarana prasarana tidak diputuskan sepenuhnya oleh program studi. Usulan kebutuhan diteruskan kepada fakultas sesuai kewenangan pengelolaan aset dan anggaran. Dalam kondisi tertentu, upaya pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan memanfaatkan kursi bekas yang masih layak agar mahasiswa tetap memperoleh tempat duduk. Langkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian praktis, tetapi kebutuhan jangka panjang tetap memerlukan perencanaan pengadaan yang memperhatikan jumlah, kualitas, dan kapasitas fasilitas.

c). Penyimpanan dan Inventarisasi: Inventarisasi dilakukan dengan pencatatan barang berdasarkan ruang dan dilanjutkan dengan input data ke dalam sistem oleh staf fakultas. Data inventaris membantu pengelola mengetahui jenis dan sebaran fasilitas. Di sisi lain, pencatatan manual pada tahap awal dapat menambah pekerjaan administratif dan berpotensi menimbulkan keterlambatan pembaruan apabila tidak diikuti pemeriksaan data secara berkala. Karena itu, konsistensi pembaruan data menjadi hal penting agar informasi inventaris tetap sesuai dengan kondisi aktual.

d). Pemeliharaan: Pemeliharaan dilakukan melalui pelaporan kerusakan, koordinasi dengan tim teknis, dan pencatatan servis peralatan. Pelaporan melalui SIDILAN memungkinkan pengguna menyertakan foto kerusakan, sementara komunikasi informal dapat membantu menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian. Data pendukung menunjukkan bahwa sebagian besar ruang masih memiliki catatan kebutuhan perbaikan, terutama pengecatan dan instalasi listrik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemeliharaan perlu dilakukan secara terencana dan berkala, tidak hanya setelah kerusakan dilaporkan.

e). Penghapusan: Berdasarkan informasi wawancara yang tersedia, belum diperoleh penjelasan rinci mengenai prosedur penghapusan aset yang tidak lagi layak digunakan. Oleh sebab itu, penelitian ini belum

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

dapat menyimpulkan bagaimana mekanisme penghapusan sarana prasarana dilaksanakan secara khusus pada lokasi penelitian. Aspek tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen inventaris, prosedur fakultas, atau wawancara lanjutan dengan unit yang berwenang.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya saluran pelaporan kerusakan, koordinasi antara program studi dan fakultas, pembagian kewenangan yang dapat dikenali oleh para pelaksana, serta kepedulian pimpinan program studi terhadap kondisi fasilitas. Pencatatan inventaris dan rekap servis juga menjadi modal administratif untuk memantau kondisi sarana prasarana. Selain itu, kesediaan pelaksana mencari solusi praktis, seperti menggunakan kursi yang masih layak, membantu menjaga kelangsungan kegiatan pembelajaran.

Faktor penghambat yang paling menonjol adalah keterbatasan ruang kelas di tengah peningkatan jumlah mahasiswa. Hambatan lainnya mencakup ketergantungan program studi pada keputusan dan anggaran di tingkat fakultas, kebutuhan perbaikan pada sejumlah ruang, serta pencatatan inventaris yang diawali secara manual. Waktu penyelesaian perbaikan juga dapat berlangsung lebih lama daripada waktu respons awal karena memerlukan tindak lanjut teknis. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan tidak hanya membutuhkan komunikasi yang baik, tetapi juga kecukupan sumber daya dan perencanaan kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang.

Pembahasan

Pembahasan ini menafsirkan temuan pada subbab 4.1 dengan menghubungkannya pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, tahapan manajemen sarana dan prasarana menurut Bafadal (2003), serta data kapasitas ruang kuliah FISIPOL tahun 2026. Data kapasitas ruang digunakan sebagai pembanding bagi keterangan informan sehingga pernyataan mengenai kekurangan ruang, kepadatan kelas, dan kondisi fasilitas dapat dilihat kesesuaiannya dengan kondisi fisik yang tercatat. Angka-angka turunan yang disajikan, seperti luas ruang per kursi dan perbandingan jumlah mahasiswa dengan kapasitas, merupakan hasil hitungan peneliti dari dokumen tersebut dan keterangan informan. Angka-angka itu bersifat indikatif dan bukan data resmi program studi.

Komunikasi: Pelaporan Teknis Berjalan, Informasi Perencanaan Belum Seragam

Dari sisi transmisi, informasi mengenai kebutuhan dan kerusakan fasilitas disalurkan melalui jalur yang cukup jelas, yaitu dosen atau tenaga kependidikan kepada Koordinator Program Studi, kemudian diteruskan kepada fakultas, dengan aplikasi SIDILAN sebagai kanal resmi dan WhatsApp sebagai kanal cepat. Tenaga kependidikan program studi juga menyatakan berupaya agar tidak terjadi miskomunikasi dengan koordinator program studi, pimpinan dekanat, dosen, dan petugas kebersihan. Menurut Edward III, transmisi dan kejelasan merupakan syarat awal agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dan syarat itu tampak terpenuhi untuk urusan teknis rutin. Meski demikian, keterangan tenaga kependidikan program studi menunjukkan bahwa mahasiswa jarang melaporkan kendala harian seperti AC dan lampu. Mahasiswa lebih sering datang langsung ketika proyektor bermasalah pada saat sidang skripsi atau seminar usul penelitian. Pelaporan melalui SIDILAN yang dijelaskan informan pun dilakukan oleh pegawai atau tenaga kependidikan. Hal ini memberi indikasi bahwa pengguna terbesar fasilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari jalur komunikasi kebijakan. Indikasi ini perlu dikonfirmasi dengan data dari mahasiswa karena penelitian ini belum menghimpunnya.

Dari sisi konsistensi, informasi mengenai rencana penambahan ruang kuliah berbeda-beda antarinforman. Pengelola sarana prasarana fakultas (Yon Mariono) menyebutkan rencana pembangunan dua gedung Tower setinggi 19 lantai di sebelah Fakultas Hukum, dengan groundbreaking awal 2027 dan target selesai Desember 2027. Koordinator Program Studi menyebutkan bahwa universitas masih berproses mengajukan bantuan pembangunan gedung perkuliahan dari pemerintah pusat, dengan pilihan prioritas antara rumah sakit kampus dan gedung perkuliahan, serta mengemukakan gagasan peninggian gedung eksisting hingga 15 lantai. Tenaga kependidikan program studi (Gustiawan) mendengar adanya rencana gedung tujuh lantai di area belakang. Perbedaan ini dapat terjadi karena rencana berada pada tahap yang berbeda atau karena informasi diterima dari sumber yang tidak sama. Namun dalam kerangka Edward III, ketidakseragaman informasi di tingkat pelaksana menunjukkan bahwa aspek konsistensi belum terjaga untuk informasi perencanaan jangka panjang. Wawancara juga tidak menunjukkan adanya dokumen resmi atau forum sosialisasi yang menjadi rujukan bersama. Sosialisasi aturan penggunaan fasilitas sendiri lebih banyak berbentuk imbauan lisan agar fasilitas digunakan "dengan hati".

Selain itu, penetapan kuota mahasiswa berada pada universitas, dan program studi menyatakan wajib menerima keputusan tersebut. Keterangan informan tidak menunjukkan adanya mekanisme yang

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

mempertimbangkan kapasitas ruang sebelum kuota ditetapkan, sehingga komunikasi antara pengambil keputusan kuota dan pengelola ruang tampak bersifat satu arah. Temuan ini masih bersifat dugaan dan perlu dipastikan melalui wawancara dengan pihak universitas atau Bidang 1.

Sumber Daya: Kesenjangan antara Kapasitas Fisik dan Kebutuhan Perkuliahan

Sumber daya fisik menjadi variabel yang paling menentukan dalam temuan penelitian ini. Data kapasitas ruang kuliah FISIPOL tahun 2026 mencatat 35 ruang dengan total 2.278 kursi kuliah dan luas ruang 2.561,85 m². Rata-rata kapasitas adalah 65,1 kursi per ruang, dengan rata-rata luas 1,12 m² per kursi. Kapasitas terkonsentrasi pada ruang besar. Sebanyak 20 ruang (57,1%) berkapasitas 73–80 kursi dan menampung 1.582 kursi (69,4%), dan 15 di antaranya tepat berkapasitas 80 kursi (1.200 kursi atau 52,7% dari seluruh kursi). Hanya tiga ruang berkapasitas 30 kursi atau kurang, yaitu I8.02.05, I8.02.06 (masing-masing 15 kursi), dan I9.02.02 (30 kursi), dengan total 60 kursi. Keterangan Bapak Yon Mariono bahwa kapasitas kelas dimaksimalkan hingga sekitar 80 kursi sesuai dengan pola ini. Tabel 4 merangkum kapasitas, kepadatan, dan kebutuhan perbaikan menurut gedung.

Tabel 2. Kapasitas, Kepadatan, dan Catatan Perbaikan Ruang Kuliah FISIPOL per Gedung Tahun 2026

Gedung	Jumlah Ruang	Jumlah Kursi	Luas Ruang (m²)	Luas per Kursi (m²)	Ruang dengan Catatan Perbaikan
I1	7	512	493,65	0,96	6
I2	2	159	176,87	1,11	0
I3	8	561	570,69	1,02	8
I5	6	340	459,90	1,35	5
I7	7	530	511,89	0,97	7
I8	2	30	77,76	2,59	0
G8	2	116	223,06	1,92	0
I9	1	30	48,02	1,60	0
Total	35	2.278	2.561,85	1,12	26

Sumber : Hasil olahan peneliti dari data kapasitas ruang kuliah FISIPOL Tahun 2026

Tabel 4 memperlihatkan bahwa gedung I1, I3, dan I7 memiliki luas per kursi sekitar 0,96–1,02 m², lebih rendah daripada rata-rata keseluruhan. Dua ruang di I1, yaitu I1.02.01 dan I1.02.02, memiliki 80 kursi pada luas 65,8 m² atau sekitar 0,82 m² per kursi. Sebaliknya, gedung I8 memiliki luas sekitar 2,59 m² per kursi karena kapasitasnya kecil. Ruang berkapasitas besar dengan luas per kursi yang sempit ini sejalan dengan keterangan pengelola sarana prasarana fakultas bahwa mahasiswa kuliah dalam ruangan yang padat dan bahwa kinerja AC menurun karena beban panas. Kepadatan di sini hanya dibaca dari rasio luas dan kursi, sebab data jumlah mahasiswa yang hadir tidak tersedia. Data ruang juga mencatat dua unit AC pada setiap ruang tanpa spesifikasi kapasitas pendingin, sehingga hubungan antara kepadatan dan penurunan kinerja AC belum dapat diuji secara teknis. Penelitian ini belum menggunakan standar luas ruang kuliah per mahasiswa sebagai pembanding, sehingga penilaian kepadatan hanya bersifat relatif antargedung.

Kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas dapat dilihat dengan membandingkan keterangan informan mengenai jumlah mahasiswa dengan kapasitas ruang yang disebutkan. Pengelola sarana prasarana fakultas menyebutkan bahwa Program Studi Administrasi Negara memiliki empat ruang kelas, yaitu tiga ruang berkapasitas 80 kursi dan satu ruang berkapasitas 40 kursi, sehingga kapasitasnya sekitar 280 kursi. Tabel 5 membandingkan kapasitas tersebut dengan dua keterangan jumlah mahasiswa angkatan 2023.

Tabel 3. Perbandingan Indikatif Jumlah Mahasiswa Angkatan 2023 dengan Kapasitas Empat Ruang Kelas Program Studi

Keterangan Informan	Jumlah Mahasiswa Angkatan 2023	Kapasitas Empat Ruang (kursi)	Rasio Mahasiswa terhadap Kursi	Rombel per Ruang
Pengelola sarana prasarana fakultas: lebih dari 200 mahasiswa	> 200	280	> 0,71	-
Koordinator program studi: 11 kelas, sekitar 450 mahasiswa	± 450	280	± 1,61	± 2,75 (11 : 4)

Sumber : Hasil olahan peneliti dari keterangan informan dan data kapasitas ruang. Angka hanya untuk satu angkatan.

Jika keterangan koordinator program studi digunakan, jumlah mahasiswa angkatan 2023 sekitar 1,6 kali kapasitas empat ruang tersebut. Satu angkatan saja membutuhkan kurang lebih 2,75 rombel per ruang, sehingga

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

ruang harus dipakai bergantian dan jadwal kuliah bergeser hingga pukul 21.00 WIB seperti disampaikan pengelola sarana prasarana fakultas. Jika keterangan pengelola fakultas yang digunakan (lebih dari 200 mahasiswa), satu angkatan tampak masih dapat ditampung dalam 280 kursi. Namun program studi tidak hanya mengelola satu angkatan, sehingga kebutuhan ruang tetap melebihi kapasitas empat ruang pada saat angkatan lain turut berkuliah. Dalam kedua keterangan, kekurangan ruang kuliah bukan hanya persoalan jumlah kursi, tetapi persoalan ketersediaan ruang pada setiap slot waktu perkuliahan. Persoalan ini menjelaskan mengapa pemanfaatan ruang diperpanjang hingga malam hari dan mengapa istilah "War Kelas" muncul di kalangan mahasiswa.

Dua ketidaksesuaian data perlu dicatat. Pertama, sekitar 450 mahasiswa dalam 11 rombel berarti rata-rata sekitar 41 mahasiswa per rombel, sedangkan pengelola fakultas menyebutkan setiap kelas dimaksimalkan hingga 80 kursi. Perbedaan ini dapat terjadi jika beberapa rombel digabung dalam satu ruang atau jika kedua informan merujuk pada angka yang berbeda. Kedua, informan pengelola menyebutkan 32 ruang kelas di FISIPOL, sedangkan dokumen kapasitas mencatat 35 ruang. Selisih tiga ruang sama dengan jumlah ruang berkapasitas 30 kursi atau kurang (I8.02.05, I8.02.06, dan I9.02.02). Kemungkinan informan tidak menghitung ruang kecil tersebut sebagai ruang kuliah reguler, tetapi dugaan ini belum dikonfirmasi. Dokumen kapasitas juga tidak memuat atribut kepemilikan atau peruntukan ruang menurut program studi, sehingga empat ruang milik Program Studi Administrasi Negara tidak dapat diidentifikasi dalam dokumen tersebut.

Pada aspek kondisi, 26 dari 35 ruang (74,3%) memiliki catatan perbaikan, dan ruang-ruang tersebut menampung 1.843 kursi (80,9%). Sebanyak 21 ruang di gedung I1, I3, dan I7 (60,0% dari seluruh ruang, 1.563 kursi) memerlukan pengecatan dan peremajaan instalasi listrik, dan lima ruang di I5 memerlukan penggantian tirai. Catatan perbaikan ini tidak dapat dipastikan sebagai akibat peningkatan intensitas pemakaian. Namun pemakaian ruang yang lebih lama hingga malam hari dan jumlah pengguna yang lebih banyak menjadikan kebutuhan peremajaan instalasi listrik layak diperhatikan. Data ruang mencatat LCD, meja dan kursi dosen, dua unit AC, dan papan tulis tersedia di semua ruang, tetapi data itu hanya menandai keberadaan fasilitas dan tidak menilai kelayakannya. Tenaga kependidikan program studi menyampaikan bahwa AC sudah tua dan cahaya LCD proyektor mulai redup, serta mengusulkan peralihan ke Smart TV seperti di Fakultas Hukum. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas tidak dapat disamakan dengan kelayakan fasilitas. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian di FISIPOL UNESA yang menilai kualitas sarana prasarana baik secara umum, tetapi masih menyoroti aspek pemeliharaan (Prima Putri Regina et al., 2026).

Pada aspek sumber daya manusia, tugas administrasi program studi ditangani satu orang tenaga kependidikan yang menilai bebannya masih dapat dijalankan, sedangkan pelatihan yang pernah diikuti adalah pelayanan prima, bukan pengelolaan sarana prasarana. Pelatihan teknis diikuti oleh pengelola perlengkapan fakultas. Pembagian ini wajar selama kewenangan teknis berada di fakultas. Namun penguatan kapasitas tenaga program studi dalam hal pencatatan kebutuhan, pelaporan, dan pemantauan fasilitas akan membantu program studi menyusun usulan yang lebih terukur. Dari sisi kewenangan dan anggaran, program studi tidak memiliki anggaran fisik dan hanya berwenang mengusulkan, merawat, dan memanfaatkan fasilitas. Menurut Edward III, sumber daya yang memadai mencakup kewenangan yang sepadan dengan tanggung jawab pelaksana. Program studi bertanggung jawab atas kelancaran pembelajaran, tetapi tidak memegang keputusan kuota mahasiswa maupun anggaran penambahan ruang, sehingga kemampuannya mengatasi kekurangan ruang terbatas pada upaya penyesuaian.

Disposisi: Komitmen Pelaksana yang Bersifat Responsif dan Adaptif

Disposisi pelaksana secara umum menunjukkan sikap yang positif. Koordinator program studi menghubungi tim teknis ketika lampu rusak, memohon kursi bekas layak pakai agar mahasiswa tidak duduk di lantai, dan mengimbau mahasiswa menjaga fasilitas. Tim sarana prasarana fakultas memiliki target respons komplain maksimal 1 x 24 jam, dan tenaga kependidikan program studi menangani kendala proyektor secara langsung ketika sidang atau seminar berlangsung. Menurut Edward III, sikap pelaksana seperti ini mendukung implementasi karena pelaksana bersedia menjalankan kebijakan sesuai tujuannya. Pemasangan sensor otomatis AC di Gedung I3, yang sesuai dengan keterangan koordinator program studi, juga menunjukkan upaya melindungi peralatan dan menghemat energi tanpa bergantung pada kesadaran pengguna.

Namun komitmen tersebut cenderung bersifat responsif dan adaptif. Pelaksana bertindak ketika masalah muncul, misalnya dengan menerima kursi bekas, sedangkan persoalan mendasar yaitu keseimbangan antara kuota mahasiswa dan jumlah ruang berada di luar kendali program studi. Koordinator program studi menyatakan bahwa program studi wajib menerima keputusan kuota sebagai bagian dari tim universitas, dan menilai bahwa perkuliahan hibrida atau daring pascastatus PTNBH juga bermanfaat bagi mahasiswa yang bekerja. Sikap ini menunjukkan kepatuhan dan sikap menerima, tetapi juga memperlihatkan bahwa

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pembelajaran daring atau hibrida menjadi cara menyesuaikan diri dengan keterbatasan ruang. Persepsi pelaksana juga berbeda menurut posisinya. Tenaga kependidikan program studi menilai tidak ada kendala besar karena koordinasi berjalan baik, sedangkan pengelola sarana prasarana fakultas menegaskan bahwa penambahan ruang kelas sudah menjadi kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditunda. Perbedaan ini wajar karena yang pertama menilai dari kelancaran layanan harian dan yang kedua dari kapasitas fisik. Kedua penilaian itu perlu dibaca bersama.

Struktur Birokrasi: SOP Berjalan, Kewenangan Terfragmentasi

Aspek SOP berjalan dengan baik. Tenaga kependidikan program studi menegaskan bahwa SOP harus dilaksanakan sesuai ketentuan fakultas dan universitas, pelaporan kerusakan menggunakan SIDILAN dengan lampiran foto, dan inventarisasi dicatat per ruang lalu dimasukkan ke sistem oleh staf fakultas. Rekapitulasi jadwal servis AC disimpan di bagian perlengkapan fakultas. Namun kartu riwayat servis tidak dipasang di ruang kelas. Hal ini menyebabkan pengguna dan koordinator program studi tidak dapat melihat langsung riwayat pemeliharaan, sehingga keterlacakan kondisi fasilitas bergantung pada data fakultas.

Edward III menyebut fragmentasi sebagai persebaran tanggung jawab kebijakan pada beberapa unit. Temuan ini memperlihatkan fragmentasi tersebut. Kuota mahasiswa ditetapkan universitas, kecukupan kelas ditentukan Bidang 1 (akademik), penyediaan sarana dilakukan Bidang 2, dan program studi mengusulkan kebutuhan. Tidak tampak satu unit yang bertanggung jawab menyeimbangkan keputusan kuota dengan kapasitas ruang. Fragmentasi juga terlihat pada data. Data mahasiswa aktif dikelola Bidang 1, sedangkan data fisik ruang dipegang pengelola sarana prasarana fakultas, sehingga rasio mahasiswa terhadap kursi tidak tersedia dalam satu dokumen dan harus dihitung dari dua sumber, sebagaimana dilakukan pada Tabel 5. Pengelola sarana prasarana fakultas juga menyatakan tidak berwenang menjawab kebijakan di tingkat jurusan, yang menandakan pembatasan kewenangan yang jelas antarunit.

Pada standar layanan, target 1 x 24 jam perlu dibedakan dari waktu penyelesaian. Pengelola sarana prasarana fakultas menyebutkan komplain seperti AC ditargetkan selesai dalam 1 x 24 jam, sedangkan tenaga kependidikan program studi menyebutkan tindak lanjut berlangsung dalam hitungan hari hingga kurang dari satu bulan. Perbedaan ini dapat terjadi karena jenis kerusakan yang tidak sama dan karena target tersebut mengukur respons awal. Tanpa data log SIDILAN, ketaatan terhadap target tersebut belum dapat diverifikasi. Informasi mengenai penghapusan aset belum diperoleh dari wawancara, sehingga tahap penghapusan belum dapat dinilai.

Pembahasan Berdasarkan Tahapan Manajemen Sarana dan Prasarana

Jika temuan dilihat dari tahapan manajemen menurut Bafadal (2003), tahap yang bersifat operasional berjalan lebih baik daripada tahap yang bergantung pada keputusan di luar program studi. Tabel 6 merangkum penilaian tersebut.

Tabel 4. Sintesis Temuan Menurut Tahapan Manajemen Sarana dan Prasarana

Tahapan	Temuan Utama	Catatan Analisis
Perencanaan	Kuota mahasiswa ditetapkan universitas; kecukupan kelas ditentukan Bidang 1; rencana gedung baru dijelaskan berbeda-beda.	Perencanaan kapasitas belum terhubung dengan keputusan kuota; informasi rencana belum seragam.
Pengadaan	Dilakukan fakultas; program studi mengusulkan dan menerima kursi bekas layak.	Pemenuhan bersifat sementara; kebutuhan jangka panjang bergantung pada pembangunan gedung.
Penyimpanan dan inventarisasi	Pencatatan manual per ruang, lalu diinput ke sistem oleh staf fakultas.	Perlu pembaruan berkala agar data sesuai kondisi aktual.
Pemeliharaan	SIDILAN, target 1 x 24 jam, rekap servis AC; 26 dari 35 ruang bercatatan perbaikan.	Bersifat reaktif; perlu jadwal pemeliharaan terencana dan kartu servis yang terlihat pengguna.
Penghapusan	Belum diperoleh informasi dari wawancara.	Belum dapat dinilai; perlu dokumen inventaris atau wawancara lanjutan.

Sumber : Hasil olahan peneliti dari wawancara dan data kapasitas ruang

Pola yang terlihat adalah tahap pemeliharaan dan inventarisasi telah memiliki mekanisme, sedangkan tahap perencanaan dan pengadaan belum menyelesaikan persoalan kapasitas. Hal ini selaras dengan keterangan bahwa perbaikan pemeliharaan saja tidak cukup untuk menjawab kebutuhan ruang kelas.

Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu dan Jawaban atas Rumusan Masalah

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Prima Putri Regina et al., n.d.) di FISIPOL UNESA yang menilai kualitas sarana prasarana secara umum baik, tetapi masih menyoroti pemeliharaan. Dalam penelitian ini, aspek

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

pemeliharaan juga terlihat dari 26 ruang yang memiliki catatan perbaikan. Temuan mengenai tahapan pengelolaan dan pembagian kewenangan juga sejalan dengan (Yanti et al., 2026) yang menekankan bahwa pengelolaan sarana prasarana mencakup perencanaan hingga penghapusan secara berkelanjutan, dan menekankan kapasitas sumber daya manusia dan konsistensi tata kelola fasilitas. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pada konteks program studi, hambatan tidak hanya bersumber dari kualitas pemeliharaan dan kapasitas pelaksana, tetapi juga dari tidak seimbangan antara keputusan kuota mahasiswa dan kapasitas ruang yang berada di luar kewenangan program studi. Pengalaman mahasiswa sebagaimana diteliti oleh (Tri Satria et al., n.d.) belum dihimpun langsung dalam penelitian ini, sehingga fenomena "War Kelas" dibahas berdasarkan keterangan pengelola.

Berdasarkan pembahasan tersebut, implementasi kebijakan manajemen sarana dan prasarana pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara UNESA dapat dikatakan berjalan pada aspek prosedural, yaitu pelaporan melalui SIDILAN, kepatuhan terhadap SOP, serta komitmen pelaksana, tetapi terbatas pada aspek sumber daya fisik dan kewenangan. Keterbatasan itu terutama terlihat pada ruang kelas yang tidak seimbang dengan jumlah mahasiswa pascastatus PTNBH, kewenangan anggaran dan kuota yang berada di luar program studi, serta informasi perencanaan yang belum seragam. Solusi sementara berupa perkuliahan hibrida, penggunaan kursi bekas, dan perpanjangan jam kuliah belum menggantikan penambahan ruang. Karena itu, upaya perbaikan membutuhkan koordinasi antara pengambil keputusan kuota, bidang akademik, dan bidang sarana prasarana.

Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan perlu dicatat agar hasil penelitian ini dibaca secara proporsional. Pertama, data primer berasal dari tiga informan, yaitu koordinator program studi, tenaga kependidikan program studi, dan pengelola sarana prasarana fakultas. Dosen dan mahasiswa sebagai pengguna fasilitas belum diwawancarai, padahal Bab III menetapkan keduanya sebagai kriteria informan dan merencanakan triangulasi sumber antara pengelola dan mahasiswa. Akibatnya, penilaian kualitas fasilitas, efektivitas SIDILAN dari sisi pengguna, dan dampak kekurangan ruang bagi mahasiswa baru terlihat dari sudut pandang pengelola. Keterangan seperti "War Kelas" juga belum dapat diverifikasi dari mahasiswa.

Kedua, data jumlah mahasiswa belum seragam dan belum bersumber dari data resmi akademik (Bidang 1). Koordinator program studi menyebut sekitar 450 mahasiswa dalam 11 kelas pada angkatan 2023, sedangkan pengelola sarana prasarana fakultas menyebut lebih dari 200 mahasiswa. Karena itu, perhitungan rasio mahasiswa terhadap kursi pada Tabel 5 bersifat indikatif dan hanya mencakup satu angkatan. Rasio untuk seluruh mahasiswa aktif program studi belum dapat dihitung.

Ketiga, data kapasitas ruang kuliah tidak memuat jadwal pemakaian, tingkat keterisian, kepemilikan ruang menurut program studi, maupun penilaian kualitas peralatan. Empat ruang milik program studi dan selisih 32 dengan 35 ruang kelas tidak dapat diverifikasi dari dokumen tersebut. Catatan "P" pada LCD, AC, dan papan tulis hanya menandai keberadaan fasilitas. Baris kebutuhan dan kekurangan kursi pada berkas tersebut juga tidak dapat dibaca karena rumusnya merujuk pada sel yang tidak tersedia (#REF!), sehingga kekurangan kursi tidak dapat dihitung dari dokumen. Penelitian ini juga belum memakai standar luas ruang kuliah per mahasiswa sebagai pembanding, sehingga penilaian kepadatan hanya bersifat relatif antargedung.

Keempat, hasil penelitian bersumber utama dari wawancara dan data kapasitas ruang. Hasil observasi lapangan dan telaah dokumen kebijakan, seperti SOP pemeliharaan dan layanan pengaduan, belum disajikan secara rinci pada bab ini sehingga triangulasi teknik belum optimal. Data pelaksanaan SIDILAN, seperti jumlah laporan dan waktu penyelesaian, serta dokumen inventaris dan rencana pembangunan gedung juga belum diperoleh. Karena itu, kepatuhan terhadap target 1 x 24 jam dan status rencana gedung baru hanya berdasar pada keterangan informan. Prosedur penghapusan aset belum terjawab dalam wawancara.

Kelima, penelitian dilakukan secara kualitatif pada satu program studi dalam waktu sekitar dua bulan, sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke program studi atau perguruan tinggi lain. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan dosen dan mahasiswa, menggunakan data resmi jumlah mahasiswa aktif dan jadwal pemakaian ruang, serta menelaah dokumen SOP dan data layanan SIDILAN agar gambaran implementasi lebih lengkap.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran di Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik UNESA melalui empat variabel teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta tahapan manajemen fasilitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

prosedural dan operasional rutin, namun masih menghadapi kendala substansial pada ketersediaan sumber daya fisik dan pembagian kewenangan[. Pada variabel komunikasi, alur pelaporan kerusakan teknis harian telah berjalan jelas dan responsif melalui aplikasi SIDILAN serta grup koordinasi WhatsApp. Meski demikian, komunikasi mengenai perencanaan jangka panjang (seperti rencana pembangunan gedung baru) belum seragam di tingkat pelaksana, serta penetapan kuota penerimaan mahasiswa dari universitas masih bersifat satu arah tanpa berkoordinasi secara eksplisit dengan pengelola ruang di fakultas. Sementara itu, pada variabel sumber daya, terjadi kesenjangan mendasar antara kapasitas fisik ruang kelas dengan lonjakan jumlah mahasiswa pascastatus PTNBH, yang memicu keterbatasan ruang, pergeseran jadwal perkuliahan hingga malam hari, serta munculnya fenomena War Kelas. Selain itu, program studi tidak memiliki kewenangan anggaran dan aset fisik secara mandiri, dan tercatat 26 dari 35 ruang kelas (74,3%) membutuhkan perbaikan seperti pengecatan, pembaruan instalasi listrik, serta peremajaan fasilitas pendukung.

Ditinjau dari variabel disposisi, para pelaksana kebijakan (Koordinator Program Studi dan tenaga kependidikan) menunjukkan komitmen dan sikap adaptif yang sangat positif dalam menjaga kelangsungan perkuliahan, seperti kesediaan memanfaatkan kursi bekas yang masih layak pakai dan mendampingi kendala teknis secara langsung di lapangan. Pada variabel struktur birokrasi, Standard Operating Procedures (SOP) dan pencatatan inventaris telah dilaksanakan dengan baik, namun terjadi fragmentasi kewenangan antara pengambil keputusan kuota (universitas), pengelola akademik (Bidang 1), dan pengelola sarana prasarana (Bidang 2 FISIPOL) tanpa adanya unit terintegrasi untuk menyeimbangkan kuota dengan daya tampung fisik. Berdasarkan tahapan manajemennya, tahapan operasional rutin seperti pemeliharaan dan inventarisasi telah memiliki mekanisme kerja, sedangkan tahap perencanaan dan pengadaan belum mampu mengatasi keterbatasan kapasitas ruang secara permanen.

Temuan ini memberikan implikasi dan kontribusi akademik yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu Administrasi Publik mengenai implementasi kebijakan Edward III di lingkungan perguruan tinggi dengan membuktikan bahwa hambatan implementasi tidak selalu bersumber dari rendahnya komitmen pelaksana, melainkan dari ketidakseimbangan antara kebijakan makro (penetapan kuota PTNBH) dengan kapasitas fisik mikro serta fragmentasi antarunit birokrasi[1]. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi konkret bagi Program Studi Administrasi Publik, FISIPOL, dan manajemen UNESA dalam menyelaraskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru dengan daya tampung ruang kelas, meningkatkan transparansi pemeliharaan fasilitas (seperti pemasangan kartu riwayat servis AC di ruang kelas), serta mempercepat realisasi penambahan gedung kuliah baru.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasi hasil temuan ini. Data primer penelitian ini baru dihimpun dari tiga informan pihak pengelola (Koorprodi dan tenaga kependidikan), sehingga perspektif dosen dan mahasiswa sebagai pengguna langsung fasilitas belum terakomodasi secara menyeluruh. Selain itu, data jumlah mahasiswa aktif dan rasio kapasitas ruang masih bersifat indikatif dari hasil wawancara dan belum terverifikasi dari data resmi akademik (Bidang 1), dokumen log transaksi aplikasi SIDILAN belum dianalisis secara rinci, serta prosedur teknis penghapusan aset (write-off) belum dapat terjelaskan. Penelitian kualitatif studi kasus tunggal ini juga memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi ke program studi atau perguruan tinggi lain.

Sebagai langkah pengembangan, saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengintegrasikan perspektif dosen dan mahasiswa melalui triangulasi sumber guna menguji validitas kualitas layanan fasilitas. Penelitian berikutnya juga disarankan menggunakan pendekatan kombinasi (mixed methods) atau kuantitatif dengan memanfaatkan data resmi jumlah mahasiswa aktif, log histori aplikasi SIDILAN, dan peta jadwal perkuliahan untuk menghitung rasio pemanfaatan ruang secara presisi[33]. Selain itu, area eksplorasi mengenai mekanisme penghapusan sarana prasarana yang belum terungkap serta studi komparatif pengelolaan fasilitas antar-program studi atau antar-PTNBH lain di Indonesia sangat direkomendasikan untuk memperdalam pemahaman tentang topik ini.

DAFTAR REFERENSI

Indah Prabawati, N., MSi Nama DrTotok Suyanto, Ss., & Jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Jabatan Dekan FISH Unesa Master Salinan Terkendali Salinan Tidak Terkendali, Mp. (n.d.). Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Standar Operasional Prosedur Penggunaan Laboratorium Manajemen Dan Kebijakan Publik.

Jannah, R. R., & Santosa, S. (2025). Manajemen Sarana dan Prasarana di Pendidikan Dasar dan Indah Prabawati, N., MSi Nama DrTotok Suyanto, Ss., & Jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Jabatan Dekan FISH Unesa Master Salinan Terkendali Salinan Tidak Terkendali, Mp. (n.d.).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Standar Operasional Prosedur Penggunaan Laboratorium Manajemen Dan Kebijakan Publik.

Jannah, R. R., & Santosa, S. (2025). Manajemen Sarana dan Prasarana di Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 3(2), 660–670. https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.950

Lisa, W., Adelia, M., Rhama, B., & Ilham Thareq, S. (2025). Efektivitas Dana KIP-K Dalam Mendukung Pengeluaran Mahasiswa Angkatan 2023 Di Kampus Negeri Palangka Raya. In JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Vol. 22, Number 02).

Prima Putri Regina, Z., Artika Sari, D., Anindya Krisna Putri, A., Oktavia Sari, I., & Hefril Gatmalia, M. (n.d.-a). Journal of Public Policy, Governance and Local Government The Effect of Facilities and Infrastructure Quality on Student Satisfaction at Faculty of Social and Political Sciences, State University of Surabaya. Retrieved https://journal.unesa.ac.id/index.php/jppglg

Prima Putri Regina, Z., Artika Sari, D., Anindya Krisna Putri, A., Oktavia Sari, I., & Hefril Gatmalia, M. (n.d.-b). Journal of Public Policy, Governance and Local Government The Effect of Facilities and Infrastructure Quality on Student Satisfaction at Faculty of Social and Political Sciences, State University of Surabaya. Retrieved https://journal.unesa.ac.id/index.php/jppglg

Sassi, K., Penelitian, A., & Kunci, K. (2024). Hasil Pencapaian Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Mendukung Suistanable Development Goals Abad 21 Results of Higher Education Achievements in Indonesia in Supporting the 21st Century Sustainable Development Goals. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(12), 4498–4509. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6413

Sitorus, M. (n.d.). Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir).

Soro, S. H., Budiman, K., Suprihadi, D., & Ainiyah, N. (2023). Implementasi Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan Di Institut Perguruan Tinggi (IPI) Garut", al-Afkar. Journal For Islamic Studies, 6(2), 291–303. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i2.669

Sry Ramdani, R., & Surya Abdi, F. (2025). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang

Kreatif Lapangan Di Pasar Masomba Kota Palu. In JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan (Vol. 1, Number 2). https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/index

Tri Satria, C., Truna Wijayanti, D., Rizki Fadhilah, M., & Saefudin, A. (n.d.). Pengalaman Mahasiswa Dalam Mengakses Fasilitas Kampus: Studi Kasus Di Gedung Ppg Uin Jakarta.

Prima Putri Regina, Z., Artika Sari, D., Anindya Krisna Putri, A., Oktavia Sari, I., & Hefril Gatmalia, M. (n.d.). Journal of Public Policy, Governance and Local Government The Effect of Facilities and Infrastructure Quality on Student Satisfaction at Faculty of Social and Political Sciences, State University of Surabaya. Retrieved https://journal.unesa.ac.id/index.php/jppglg

Tri Satria, C., Truna Wijayanti, D., Rizki Fadhilah, M., & Saefudin, A. (n.d.). Pengalaman Mahasiswa Dalam Mengakses Fasilitas Kampus: Studi Kasus Di Gedung Ppg Uin Jakarta.

Yanti, H., Firgiawan, F., Jufri, A., & Afiif, A. (2026). Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Proses Pembelajaran Mahasiswa Mpi Uin Alauddin Makassar. In Educational Leadership (Vol. 5, Number